

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Proses penatausahaan dan akuntansi Pemkot Yogyakarta secara garis besar telah mengikuti aturan dalam permendagri tetapi telah terdapat modifikasi di dalam prakteknya agar prosesnya dalam mudah dipahami dan mudah dikontrol oleh jajaran yang melaksanakannya. Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai aturan sendiri dalam urusan penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, dan aturan tersebut tidak menyimpang dalam aturan yang telah ditetapkan dalam permendagri atau mempunyai tujuan yang sama dengan aturan permendagri. Proses dalam penatausahaan dan akuntansi setiap daerah diberlakukan pada Pemkot Yogyakarta telah sesuai menurut ketentuan daerah masing-masing dan menurut aturan dalam permendagri. Aturan yang digunakan tersebut dirasa cocok diterapkan dalam proses penatausahaan dan akuntansi dalam Pemkot Yogyakarta karena mudah dikontrol, dipahami, dan mudah digunakan. Pemkot Yogyakarta sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam urusan proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, sehingga penggunaan aturan yang lama dirasa cocok serta memilah peraturan yang baru untuk kesesuaiannya jika diterapkan dalam keuangan Pemkot Yogyakarta. Dengan cara tersebut, maka proses penatausahaan dan akuntansi dalam Pemkot Yogyakarta mudah dikontrol oleh aparaturnya sehingga proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah Pemkot Yogyakarta dapat berjalan baik dan lancar.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah tersebut akibat perubahan kebijakan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri yaitu Sumber Daya Manusia, peraturan-peraturan, sarana prasarana/fasilitas, komitmen dari pimpinan, dan sosialisasi.

V.2. Saran

Setiap daerah memiliki kewenangan sendiri atas pengelolaan keuangannya dan daerah sendiri harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Setiap daerah memiliki cara masing-masing dalam menjalankan penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah agar dapat mudah dipahami oleh aparaturnya, sesuai dengan kemampuan sumber daya didalamnya, serta mudah dikendalikan oleh aparatur yang tercakup didalamnya. Bukan hanya itu saja, daerah juga harus memikirkan kapasitas penatausahaan dan akuntansi yang ada didalamnya dan memiliki ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Dalam permendagri nomor 55 tahun 2008 tidak memuat secara detail proses dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, oleh sebab itu dibutuhkan kreatifitas, pemahaman, dan pengalaman dari lalu untuk menjalankan proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah. Dengan adanya proses penatausahaan dan akuntansi yang baik maka penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan transparan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dan kecurangan.

Dengan adanya keterbatasan dalam proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah pada perlu dilakukan perbaikan dan upaya dalam meningkatkan proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara :

1. Sumber Daya Manusia. Dilakukan asistensi, pendampingan, dan pelatihan-pelatihan. Dengan terbatasnya sumber daya di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka untuk pelatihan dilakukan kerjasama dengan institusi/lembaga yang kompeten. Selain itu dapat juga mengirim personil untuk mengikuti kursus.
2. Peraturan-peraturan. Kebijakan kepala daerah sangat berperan penting dalam penerapan peraturan yang baru. Peraturan baru yang berasal dari pusat dapat ditelaah kemudian diterapkan menjadi peraturan daerah yang baru, sehingga peraturan baru dari pusat tersebut dapat diterapkan dengan baik.
3. Sarana Prasarana/Fasilitas. Meninjau ulang sarana prasarana kurang memadai seperti perangkat keras dan perangkat lunak.
4. Komitmen dari Pimpinan. Dibutuhkan atasan yang mau turut ambil bagian dalam urusan bawahan atau urusan dinasny, oleh karena itu atasan paling tidak harus mengerti mengenai proses penatausahaan dan akuntansi.
5. Sosialisasi. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaksana penatausahaan dan akuntansi jika terdapat perubahan aturan dalam proses penatausahaan dan akuntansi guna mempercepat proses pemahaman tentang penatausahaan dan akuntansi.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2009. Kota Yogyakarta Dalam Angka Katalog : 1102001.3471. Yogyakarta : BPS Kota Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasiara, La Ode. 2009. Pemahaman Akuntansi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Buton. Jurnal Ekonomi Bisnis, Tahun 14, Nomor 2.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah, Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2003. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta : Cetakan Pertama ANDI.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. 2009. Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia.2007.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia.2008.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sinaga, Jamason. 2007. Penyajian Neraca Awal Pemda. Jakarta : KSAP.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
Konsep dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Zainie, Abdullah. 2008. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Sambutan Wakil Ketua BPK-RI Dalam Rangka Seminar Pengelolaan
Keuangan Daerah Menuju Transparansi dan Akuntabilitas. Padang : BPK-
RI.



LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 BUKU PEMBANTU
 PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

NPD
 Kode rekening
 Nama Rekening
 Jumlah Anggaran
 Bulan Anggaran

Rp.....

Halaman:

Nomor Buk	Nomor BKU Penerimaan	Tanggal Setor	Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah Bulan ini				
Jumlah s.d. Bulan Lalu				
Jumlah s.d. Bulan Ini				

..... tanggal
 Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
 NIP.

Bank (Nama bank)

No (Nomor slip setoran)

No.Rekening

(No.rekening penerima)

Nama dari Rekening

(Nama pihak penerima)

Disetor Oleh

Untuk dikirimkan pada hari kerja berikutnya

PD check untuk dikliringkan tanggal

No.SEQ

BUKTI SETORAN/SLIP DEPOSIT

Tanggal

Tunai		Rp
Cek		
Nomor	Bank	
Total		

TOTAL KREDIT Rp

Terbilang

Tanda Tangan

DIISI OLEH BANK

Kurs		Rp
------	--	----------

LAMPIRAN SPD NOMOR
 BELANJA LANGSUNG s/d
 PERIODE BULAN
 TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Dana DPA-SKPD TA. 200x	Akumulasi SPD sebelumnya	Sisa SPD yang Belum di SPD-kan	Jumlah Dana Yang di SPD- kan Bln. TW ...	Jumlah SPD s/d Bulan Ini	Sisa Jumlah Dana DPA-SKPD

Jumlah Dana Belanja Langsung: Rp
 (Terbilang:)

Ditetapkan di
 pada tanggal

PPKD SELAKU BUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
 NIP.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
JLN KENARI NO. 56 TELP. 548519, 554080 FAXIMILE (0274) 554080
YOGYAKARTA

KODE POS 55165

EMAIL INTERNET : dpdpk@jogjaakot.go.id; EMAIL INTRANET : dpdpk@intra.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1119/DPDPK/VII/2010

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Sukamiasih
NIP : 19600608 198603 2 005
Jabatan : Sekretaris DPDPK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDREA ANGGIAT P
NIM : 05 04 15618
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi -- UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta.

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dengan judul Proposal "*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yogyakarta*)" terhitung mulai tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan selesai.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 14 Juli 2010

Kepala
Sekretaris DPDPK
DINAS PAJAK DAERAH
DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
Dra. Sukamiasih
NIK 19600608 198603 2 005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1504
3011/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ekonomi - UAJ Yogyakarta
Nomor : 22/R/I Tanggal : 31/05/2010
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : ANDREA ANGGIAT P. NO MHS / NIM : 05 04 15618
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta
Penanggungjawab : H. Andre Purwanugraha, SE., MBA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 10/06/2010 Sampai 10/09/2010
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ANDREA ANGGIAT P.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 11-6-2010

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HAR DONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
3. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
4. Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta
5. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta
6. Ka. BPS Kota Yogyakarta
7. Ka. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Yk
8. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
9. Dekan Fak. Ekonomi - UAJ Yogyakarta
10. Ybs.